



Searching & Serving the Best

Bogor Agricultural University (IPB)

<http://ipb.ac.id>

Pembahasan Kebijakan PILAR 1

Prof. Muhammad Firdaus. PhD

Department of Economics, Bogor Agricultural University

Corresponding email: mfirdaus@ipb.ac.id



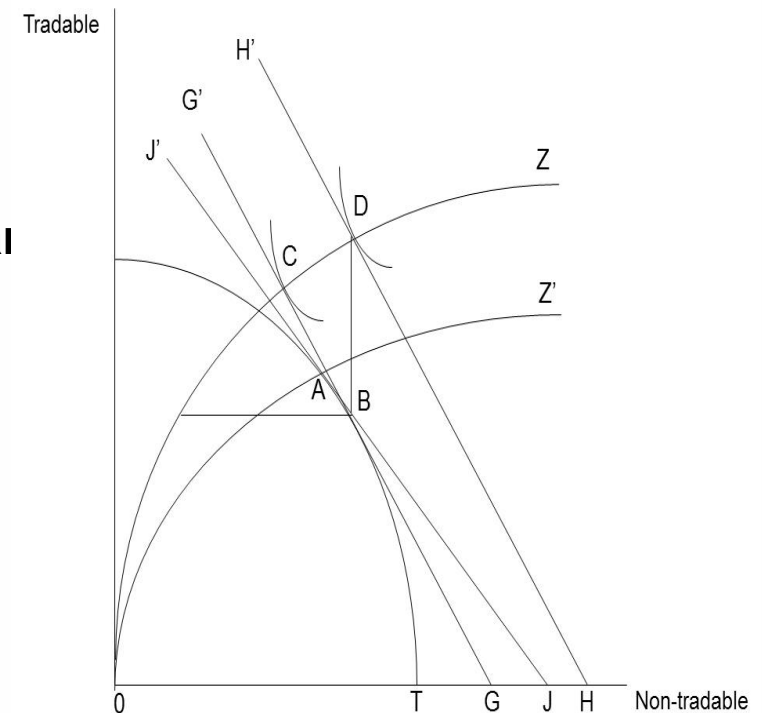
Justifikasi Kebijakan

Tiga sasaran makroekonomi dalam pembangunan INKLUSIF:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan tingkat inflasi yang stabil
2. Kesempatan kerja
3. Surplus dalam neraca perdagangan

Ketiga target di atas dapat bersifat *trade-off*: internal vs external balance

Model **Salter-Corden** memberikan landasan teori yang relevan untuk menjawab secara simultan permasalahan di atas.





Justifikasi Kebijakan

Salter-Corden model:

Diasumsikan bila ada kebijakan kontraksi fiskal yang menyebabkan kelebihan suplai barang *non-tradable*, disertai dengan kondisi **depresiasi nilai tukar**, maka harga-harga barang *tradable* (relatif) akan naik di dalam negeri: menyebabkan *union* menuntut kenaikan upah. Kondisi yang baik dicapai bila TK *mobile*, dari sektor yang memproduksi bergeser dari *non-tradable* ke *tradable*.

Untuk dapat inklusif, strategi pengembangan sektoral harus: “***labor-intensive export industrialization strategy***”.

Dengan orientasi ekspor, maka daya saing menjadi kata kunci. Kebijakan harus fokus ke arah ini, baik untuk pertanian, agro dan non agroindustri juga pariwisata.



Pembahasan Kebijakan Pilar I

Bagian 1

Pertumbuhan Ekonomi

Bagian 2

Kesempatan Kerja

Bagian 3

Infrastruktur Ekonomi



Pembahasan Kebijakan Bagian 1

I. PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI

Kebijakan:

1. Optimalisasi SD pertanian dan perikanan
2. Akselerasi sektor strategis

Ini sudah sesuai dengan justifikasi kebijakan berdasarkan teori Salter-Corden sebelumnya.

Tantangan utama adalah bagaimana mengembalikan paradigma **DAYA SAING** dalam pembangunan sektoral.

Analisis daya saing seperti PAM mengajarkan efisiensi dan kesejahteraan produsen sensitif pada **PRODUKTIVITAS**



Pembahasan Kebijakan Bagian 1

II. RASIO KREDIT PERBANKAN TERHADAP PDB NOMINAL

Kebijakan:

1. Pengembangan skema tabungan, literasi keuangan dan *branchless banking*
2. Penjaminan kredit dan perluasan jangkauan agen bank

Kebijakan di atas sudah sejalan dengan hasil studi Bank Indonesia tentang Strategi Perluasan Akses Keuangan Secara Spasial. Aspek LITERASI sangat penting.

Pengembangan FINTECH berperan besar dalam peningkatan tabungan (contoh kegiatan: TA IT Development di Dir Irigasi).

Untuk kredit, perluasan PEMBIAYAAN (SYARIAH) serta akses UMKM ke perbankan dapat menjadi fokus: pengembangan UMKM dengan orientasi ekspor berbasis DESA.



Pembahasan Kebijakan Bagian 1

III. PANGSA MANUFAKTUR TERHADAP PDRB

Kebijakan:

1. Produktivitas SDM industry, daya saing dan GPN
2. Optimalisasi permintaan produk industri

Kebijakan di atas harus mencakup ekspansi industri manufaktur ke luar Jawa. Studi terkini DJ BC Kemenkeu terhadap lebih dari 1,600 perusahaan KB-KITE, hanya dua propinsi di luar Jawa yaitu Sumut dan Riau yang mempunyai peran signifikan (*Uneven regional development is issue*)

Singkronisasi hulu dan hilir menjadi keharusan. Pemetaan secara baik *backward and forward linkages* antar sektor harus dilakukan secara spasial.



Pembahasan Kebijakan Bagian 2

I. TINGKAT KESEMPATAN KERJA

Kebijakan:

1. Peningkatan investasi, kewirausahaan dan sumber pt baru
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas Angkatan Kerja

Peningkaan investasi di luar Jawa dan Jawa bagian selatan merupakan PR besar. Ini dikaitkan dengan upaya hilirisasi berbasis SDA.

Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dapat diupayakan lebih serius. Penerapan *decent work* menjadi konsen terutama terkait isu *non permanent worker*, renumerasi berbasis produktivitas dan dialog social.



Pembahasan Kebijakan Bagian 2

II. PERSENTASE TK DENGAN PENDIDIKAN SMA KE ATAS

Kebijakan:

1. Pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan industri
2. Penguatan PT dan inovasi

Sejalan dengan upaya pengembangan SDM untuk pertumbuhan yang berkualitas, maka pendidikan vokasi harus mendapatkan perhatian serius. Di Yogyakarta, seorang tamatan SMK Pertanian dapat me-release lebih dari 30 varietas karena bekerja di East West 10 tahun: *community college*.

Kualitas PT akan didorong dengan *assessment system* berbasis LAM. Membangun STP adalah suatu keharusan.



Pembahasan Kebijakan Bagian 2

III. PERSENTASE PENDUDUK BERKERJA > 35 JAM/MINGGU

Kebijakan: (?)

1. Pendidikan vokasi berbasis kerjasama dengan industri
2. Penguatan PT dan inovasi

TK dari sektor pertanian bergeser ke sektor informal. Seharusnya dengan bekal ketrampilan yang lebih baik maka mereka dapat bekerja di sektor manufaktur. Peran BLK dan sertifikasi penting.

Pengembangan usaha di perdesaan memegang peran dalam penyerapan TK.



Pembahasan Kebijakan Bagian 3

I. Persentase RT yang Menggunakan Listrik/PLN

Kebijakan:

1. Peningkatan jaringan dan akses pendanaan
2. Efektivitas subsidi

Kebijakan pengembangan listrik untuk daerah perdesaan sangat diperlukan. Perlu terobosan selain kebijakan DMO untuk batu bara. Kajian *sustainable financing* untuk penyediaan listrik dari limbah sawit menunjukkan kondisi layak.



Pembahasan Kebijakan Bagian 3

II. PERSENTASE PENDUDUK YANG MENGUASAI TELEPON GENGAM

Kebijakan:

1. Optimalisasi USO, layanan internet
2. Perluasan layanan konten digital

Upaya untuk mendorong penggunaan IT dalam kegiatan industri dan pertanian menjadi suatu keharusan. Banyak lembaga non Pemerintah sudah mengembangkan hal ini (MSMB, 8Vilages dll.).

Penetrasi ke daerah perdesaan dan 3T dapat dilakukan jika penggunaan IT dapat memberikan efek *well-being* bagi pengguna.



Pembahasan Kebijakan Bagian 3

III. TOTAL JALAN DENGAN KONDISI BAIK DAN SEDANG

Kebijakan:

- 1. Peningkatan kinerja kemnatanapan jalan daerah**
- 2. Konektivitas daerah tertinggal dengan kawasan strategis**

Pembangunan jalan desa harus mendapatkan perhatian. Jika desa dikembangkan dengan basis ekonomi (Desa Devisa Ekspor) maka perbaikan infrastruktur dapat terjadi.

Meknaisme KPS lebih didorong lagi.



TERIMA KASIH



Source : <https://www.pertanianku.com>